



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PERUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUMNAS)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANTON RIJANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR HUKUM**
3. NHK : **402486**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 17.279.150.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.769.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 505 m2/366 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
3. Bangunan Seluas 88 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 909.900.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/405 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 3.575.024.000**

1. MOBIL, MINICOOPER JOHN COOPER WORKS GP EDITION MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. MOBIL, WULING E230REV30KW3LV24X2AT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000



3. MOBIL, HYUNDAI MOBIL IONIQ 5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 859.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
1.031.024.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 196.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 14.662.500

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 196.410.756

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 21.261.747.256

III. HUTANG Rp. 2.974.494.867

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 18.287.252.389

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.